



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 060/299 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS BUPATI PURBALINGGA NOMOR 060/ 331
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

BUPATI PURBALINGGA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keselarasan antar dokumen perencanaan, maka perlu melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama Kabupaten dengan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga serta penambahan target kinerja indikator kinerja utama, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/331 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/ 331 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

↓ 7/19

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 8);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Perubahan Atas Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 060/331 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu adalah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Purbalingga, Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dan penambahan Target Kinerja Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 20 September 2018

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Purbalingga;
2. Kepala BAKEUDA Kabupaten Purbalingga;
3. Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Purbalingga;
4. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga;
5. Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana Setda Kabupaten Purbalingga;
6. Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/299 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 060/ 331 TAHUN 2017
 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA
 UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Survey kepuasan masyarakat	Dokumen IKM
	Opini Audit Keuangan BPK	Opini	Hasil audit BPK	Laporan Hasil Audit
	Kategori Akuntabilitas Kinerja	Katagori	Hasil evaluasi dari Kementerian PANRB	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
	Hasil Penilaian LPPD	Nilai	Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Penetapan Kinerja dan Status	Hasil Kep. dari Kemendagri

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kehidupan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Paham Kebangsaan	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	%	$\frac{\text{Jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih}}{\text{Jumlah DPT}} \times 100$	Dokumen KPU
Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	%	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan Perbup yang ditangani}}{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perbup yang dilaporkan}} \times 100$	Data tribuntranmas Satpol PP
Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat .	Angka Kriminalitas	%	$\frac{\text{Kejadian kriminalitas}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 10.000$	POLRI
Tertanganinya Korban Bencana	Cakupan Korban Bencana alam yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah korban yang ditangani}}{\text{Jumlah Korban}} \times 100$	Dokumen Kebencanaan

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya Pangan dan Papan secara layak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka / nilai	% AKG X Bobot masing-masing kelompok pangan	Profil Pangan
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase rumah layak huni	persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah Layak Huni}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100$	Data RTLH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Ketersediaan rumah	Persentase rumah per KK	Persen	$\frac{\text{Jumlah Rumah}}{\text{Jumlah KK}} \times 100$	Data BPS /Dinrumkim

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA (dari dokumen)
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata - rata lama sekolah	Tahun	$RLS = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \text{lama sekolah penduduk}_i$	Release BPS
	Harapan lama sekolah	Tahun	$HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$	Release BPS
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan Hidup	Tahun	$y = L + \frac{U}{1 + be^{at}}$	Release BPS
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Keluarga sejahtera	%	$\frac{\text{Jumlah keluarga sejahtera}}{\text{jumlah keluarga}} \times 100$	Dinsosdalduk KB P3A
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Rata-rata angka kelahiran total/ TFR	Per 1000 wanita	$TFR = 5 \sum_{i=15-19}^{45-49} ASFR_i$	Release BPS

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	$\frac{\text{Jumlah pengangguran}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100$	Release BPS
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	%	$R(t - 1, t) = \frac{(PDB_t - PDB_{t-1})}{PDB_{t-1}} \times 100$	Release BPS
	Laju Inflasi	%	$Li(t - 1, t) = \frac{IHK_t - IHK_{t-1}}{IHK_{t-1}} \times 100$	Release BPS
	Angka Kemiskinan	%	$\frac{\text{Jumlah penduduk dibawah garis kemiskinan}}{\text{jumlah penduduk}} \times 100$	Release BPS

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan infrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	%	$\frac{\text{Luas kawasan kumuh}}{\text{luas kabupaten}} \times 100$	Dinrumkim

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Meningkatnya kualitas desa.	Indek Desa Membangun (IDM)	Angka	$\frac{\text{Jumlah Nilai Indeks Pembangunan Desa seluruh desa di Kabupaten Purbalingga}}{\text{jumlah Desa}} \times 100$	Kementerian Desa PDT
Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder	Cakupan air irigasi	%	$\frac{\text{Debit netto bendung}}{\text{luas areal DI}} \times 100$	Profil Pengairan
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,	Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	%	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi tata ruang}}{\text{jumlah permohonan rekomendasi tata ruang}} \times 100$	DPU-PR
Meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah	Panjang jalan kondisi mantap	%	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi mantap}}{\text{panjang jalan}} \times 100$	Database Jalan/ Jembatan
Meningkatnya akses air bersih	Cakupan pelayanan air bersih	%	$\frac{\text{Jumlah rumah terlayani air bersih}}{\text{Jumlah Rumah}} \times 100$	Dinrumkim/ PDAM

97

Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	$IKLH \text{ Kabupaten} = \frac{IPA + IPU + ITH}{3}$	DLH

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/299 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/ 331 TAHUN 2017 TENTANG
 PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

1. SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang efisien, efektif dan akuntabel	Kategori Akuntabilitas Kinerja	Nilai	<i>Hasil Penilaian dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi RI</i>
	Hasil Penilaian LPPD	Nilai	<i>Nilai Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah</i>
	Persentase Unsur Layanan Kemasyarakatan dan Keagamaan yang dipenuhi	%	$\frac{\text{Jumlah kegiatan layanan kemasyarakatan dan keagamaan yang dilaksanakan}}{\text{target kegiatan}} \times 100$
	Tingkat efisiensi <i>e procurement</i>	%	$\frac{(\text{HPS} - \text{Harga terkoreksi})}{\text{Nilai HPS paket pekerjaan}} \times 100$
	Tingkat pengendalian inflasi daerah	Angka	<i>Angka Inflasi Kabupaten Purbalingga tiap bulan</i>

2. SEKRETARIAT DPRD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	Persentase usulan Raperda yang disetujui	%	$\frac{\text{Jumlah Raperda yang disetujui}}{\text{Jumlah Usulan Raperda}} \times 100$

3. INSPEKTORAT DAERAH

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Nilai Maturitas SPIP	Level	Hasil pengukuran terhadap 25 fokus penilaian maturitas SPIP
	Level Kapabilitas APIP	Level	Hasil perhitungan pemenuhan infrastruktur yang ada dalam IACM (Internal Audit Capability Model).
	Persentase tindaklanjut LHP	%	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan internal yang mendapat status tindaklanjut}}{\text{jumlah seluruh rekomendasi}} \times 100$

4. BAPPELITBANGDA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas perencanaan	Rata-rata Capaian Target Kinerja Program Pembangunan Daerah	%	$\frac{\sum_{i=1}^n K_i}{n}$ <p><i>K_i = capaian indikator kinerja program 1 sampai dengan n yang ada di RKPD</i> <i>n = banyaknya indikator kinerja program</i></p>
Meningkatnya kualitas kelitbangan	Persentase rekomendasi kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	%	$\frac{\text{Banyaknya rekomendasi kebijakan yang diterapkan menjadi kebijakan}}{\text{Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan}} \times 100$

5. BAKEUDA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kualitas pengalokasian keuangan daerah yang efektif, transparan dan akuntabel	Ketepatan Waktu Pelayanan SP2D	Kriteria	$\frac{\text{Jumlah SP2D yang diterbitkan tepat waktu}}{\text{Jumlah SP2D yang diajukan sesuai ketentuan yang berlaku}} \times 100$
	Persentase Aset Daerah yang dimanfaatkan	%	$\frac{\text{Jumlah Aset Daerah yang dapat dimanfaatkan}}{\text{Jumlah aset daerah}} \times 100$
	Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD	%	$\frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target PAD}} \times 100$

6. BKPPD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur	Persentase Penempatan SDM ASN sesuai Formasi dan Kompetensi	%	$\frac{\text{Jumlah ASN sesuai formasi dan kompetensi}}{\text{jumlah ASN}} \times 100$
	Rata2 indeks profesionalisme ASN	%	$\frac{\text{Jumlah total nilai index profesionalisme ASN}}{\text{jumlah ASN di lingkungan pemkab}} \times 100$
	Jumlah Pelanggaran Disiplin ASN	Kasus	Jumlah pelanggaran

7. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya partisipasi sekolah	APK SD sederajat	%	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di SD/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$
	APM SD sederejat	%	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di SD atau sederajat usia 7 - 12 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 7 - 12 tahun}} \times 100$
	APK SMP sederajat	%	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di SMP/sederajat}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100$
	APM SMP sederajat	%	$\frac{\text{Jumlah peserta didik di SMP atau sederajat usia 13 - 15 tahun}}{\text{Jumlah penduduk usia 13 - 15 tahun}} \times 100$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
	APK PAUD	%	$\frac{\text{Jumlah peserta didik PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 3 - 6 tahun}} \times 100$
Meningkatnya apresiasi terhadap budaya daerah dan pelestarian budaya	Cakupan pembinaan objek pemajuan kebudayaan	%	$\frac{\text{Jumlah objek pemajuan kebudayaan yang dibina}}{\text{Seluruh Jumlah objek pemajuan kebudayaan}} \times 100$
	Cakupan pelestarian cagar budaya	%	$\frac{\text{Jumlah benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Jumlah seluruh benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan cagar budaya}} \times 100$

8. DINAS KESEHATAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	Angka Kematian Ibu (AKI)	0/00.000 per 100.000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu dalam tahap kehamilan atau kelahiran dalam periode satu tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam periode satu tahun}} \times 100.000$
	Angka Kematian Bayi (AKB)	0/.000 KH per 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi usia kurang dari 1 tahun dalam periode satu tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup dalam periode satu tahun}} \times 1.000$

↓ 7d

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
	Angka Kematian Balita (AKABA)	0/ .000 KH per 1000 KH	$\frac{\text{Jumlah kematian balita usia 0 - 5 tahun}}{\text{Jumlah balita}} \times 1.000$
	Prevalensi Balita gizi buruk	%	$\frac{\text{Jumlah balita gizi buruk}}{\text{Jumlah seluruh balita}} \times 100$

9. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Mewujudkan infrastruktur jalan, jembatan, gedung, irigasi yang mantap dan Penyelenggaraan Penataan Ruang yang aman, nyaman produktif dan berkelanjutan.	Persentase Infrastruktur jalan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik}}{\text{jumlah panjang jalan}} \times 100$
		%	$\frac{\text{Realisasi jumlah jalan lebar > 5.5 meter}}{\text{jumlah panjang kabupaten}} \times 100$
	Persentase Infrastruktur jembatan dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jumlah jembatan dalam kondisi baik}}{\text{jumlah jembatan}} \times 100$
		%	$\frac{\text{Panjang jembatan dalam kondisi baik}}{\text{Total Panjang jembatan}} \times 100$
	Persentase jaringan irigasi dalam kondisi baik	%	$\frac{\text{Jaringan irigasi dalam kondisi baik}}{\text{Total jaringan irigasi}} \times 100$

10. DINSOSDALDUKKBP3A

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Berkembangnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang terlayani	%	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terlayani}}{\text{Jumlah seluruh PMKS}} \times 100$
Meningkatnya partisipasi KB	Cakupan peserta KB aktif	%	$\frac{\text{Jumlah PUS pemakai alokon}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \times 100$
	Cakupan PUS Unmet need KB	%	$\frac{\text{Jumlah PUS tak KB IAS dan TIAL}}{\text{Jumlah seluruh PUS}} \times 100$
Meningkatnya pemenuhan dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak korban tindak kekerasan	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Angka	<i>Jumlah kasus kekerasan perempuan dan anak</i>
	Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tertangani	%	$\frac{\text{Jumlah Kasus yang tertangani}}{\text{Jumlah pengaduan}} \times 100$
	Cakupan desa dan kelurahan layak anak	%	$\frac{\text{Jumlah desa dan kelurahan layak anak}}{\text{Jumlah seluruh desa dan kelurahan}} \times 100$
	Predikat penilaian kabupaten layak anak	Prestasi	<i>Hasil penilaian</i>

11. DINRUMKIM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya ketersediaan dan distribusi air minum perdesaan	Cakupan air bersih	%	$\frac{\text{Jumlah KK akses air bersih}}{\text{Jumlah KK}} \times 100$
Meningkatnya kapasitas status tanah dan pemanfaatan tanah	Tanah pemda yang bersertifikat	%	$\frac{\text{Jumlah tanah pemda yang bersertifikat}}{\text{Jumlah tanah pemda}} \times 100$

12. DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	KLH Kab = IPA + IPU + ITH/3
	Pencemaran Emisi Gas Rumah Kaca	%	$\frac{\text{Konsentrasi gas rumah kaca tahun berjalan}}{\text{Konsentrasi gas rumah kaca tahun sebelumnya}} \times 100$

13. DINPENDUKCAPIL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	- Kepemilikan KTP	%	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KTP} - el}{\text{Jumlah wajib KTP} - el} \times 100$
	- Kepemilikan KK	%	$\frac{\text{Jumlah kepemilikan KK}}{\text{Jumlah KK}} \times 100$
	- Kepemilikan Akta Kelahiran	%	$\frac{\text{Jumlah kutipan Akta kelahiran yang diterbitkan}}{\text{Jumlah kelahiran}} \times 100$

14. DINPERMASDES

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya tingkat perkembangan dan klasifikasi status kemajuan desa	Jumlah Desa Swasembada	Desa	<i>Jumlah desa swasembada</i>
Meningkatnya jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	Jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pemberdayaan masyarakat	Lembaga	<i>Jumlah swadaya masyarakat</i>

15. DINNAKER

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kesempatan kerja yang layak dan terlindungi jaminan sosial	Pencari kerja yang ditempatkan	%	$\frac{\text{Jumlah pencari kerja yang ditempatkan}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}} \times 100$
	Rasio Tenaga kerja mendapat upah \geq UMK.	%	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja sesuai UMK}}{\text{Jumlah tenaga kerja}} \times 100$
	Tenaga Kerja yang mengikuti Jaminan Sosial	%	$\frac{\text{Jumlah pekerja peserta jaminan sosial}}{\text{Jumlah Pekerja}} \times 100$

16. DINAS PERHUBUNGAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan untuk keselamatan berlalu lintas	Sarana dan prasarana perhubungan yang memadai	%	$\frac{\text{Jumlah sarpras yang tersedia}}{\text{Jumlah sarpras yang dibutuhkan}} \times 100$

17. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya implementasi e – government dan keterbukaan informasi publik	SKPD yang memiliki website	%	$\frac{\text{Jumlah OPD yang memiliki website}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100$

18. DINAS KOPERASI DAN UKM

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kemandirian dan Daya saing Koperasi, Usaha kecil Dan Mikro	Persentase Koperasi Sehat	%	$\frac{\text{Jumlah koperasi sehat}}{\text{Jumlah Koperasi}} \times 100$
	Usaha Mikro menjadi usaha kecil	Angka	<i>Jumlah Usaha Mikro menjadi usaha kecil</i>

19. DKPP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Status Pangan Masyarakat	Ketersediaan pangan utama (beras)	Kg/Kap/Th	$\frac{\text{Produksi beras} + (\text{Import} - \text{Ekspor})}{\text{Jumlah Penduduk}}$
	Koefisien Varians Harga Pangan Pokok (beras)	%	$\frac{\text{Simpangan baku harga pangan pokok}}{\text{Jumlah Sampel Uji}} \times 100$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
	Prosentase pangan segar bersertifikat aman	%	$\frac{\text{Jumlah pangan aman yang diuji}}{\text{Jumlah Sampel Uji}} \times 100$
Meningkatnya Daya Saing sub sektor Perikanan	NTP sektor Perikanan	Nilai	Nilai NTP sub sektor Perikanan
	Tingkat konsumsi ikan	kg/kap/th	$\frac{\text{Ketersediaan Ikan}}{\text{Jumlah Penduduk}}$
	PDRB Sub Sektor Perikanan	Rupiah	Release BPS

20. DPMPTSP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat	Realisasi nilai investasi	Rupiah	Nilai investasi perusahaan baru + pertambahan investasi perusahaan yang sudah berdiri
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perijinan	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) perijinan

21. DINPORAPAR

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kualitas Kepemudaan dan prestasi olah raga	Jumlah prestasi Pemuda tingkat regional dan nasional	medali/ piagam	<i>jumlah prestasi pemuda tingkat regional + jumlah prestasi pemuda tingkat nasional</i>
	Jumlah prestasi olahraga tingkat regional/Provinsi	medali/ piagam	<i>jumlah prestasi olahraga tingkat regional/provinsi</i>
	Jumlah prestasi olahraga tingkat Nasional	Piagam/me dali	<i>Jumlah prestasi olah raga tingkat nasional</i>
Meningkatnya kualitas dan kuantitas destinasi wisata	Jumlah destinasi wisata yang memenuhi standar wisata	DTW	<i>Jumlah Obyek Wisata yang mempunyai sertifikat standar destinasi wisata</i>
	Jumlah kunjungan wisatawan	wisatawan	<i>Jumlah kunjungan wisman dan wisnus</i>

22. DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kapasitas pengelolaan kearsipan	Persentase OPD/ormas/BUMD/ lembaga desa/kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baik	%	$\frac{\text{Jumlah OPD,ormas,BUMD,lembaga desa, kelurahan yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku}}{\text{Jumlah seluruh OPD,ormas,BUMD,lembaga desa, kelurahan}} \times 100$
Meningkatnya Budaya Gemar Membaca	Rasio perpustakaan per jumlah penduduk	Rasio	$\frac{\text{Jumlah perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
	Rasio anggota perpustakaan per jumlah penduduk	Rasio	$\frac{\text{Jumlah Anggota perpustakaan}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$
	Koleksi buku perpustakaan per jumlah penduduk	rasio	$\frac{\text{Jumlah judul buku}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100$

23. DINAS PERTANIAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya kemandirian dan daya saing sektor pertanian	NTP Subsektor Padi dan Palawija	Nilai	<i>Release BPS</i>
	NTP Subsektor Tanaman Holtikultura	Nilai	<i>Release BPS</i>
	NTP Subsektor Perkebunan	Nilai	<i>Release BPS</i>
	NTP Subsektor Peternakan	Nilai	<i>Release BPS</i>
	PDRB Subsektor pertanian	Rupiah	<i>Release BPS</i>

24. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas pelaku industri	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	Rupiah	Release BPS
Meningkatnya kualitas sarpras perdagangan dan pengamanan perdagangan	Persentase sarpras perdagangan yang direvitalisasi	%	$\frac{\text{Jumlah revitalisasi sarpras perdagangan}}{\text{Jumlah sarpras perdagangan}} \times 100$

25. SATPOL PP

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya ketertiban, keamanan, dan perlindungan masyarakat	Persentase pelanggaran Perda yang ditangani	Persen	$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran perda yang ditangani}}{\text{Jumlah pelanggaran}} \times 100$
Menurunnya Resiko Bencana dan Kebakaran	Indeks Resiko Bencana dan Kebakaran	Angka	$\text{Ancaman} \times \frac{\text{Kerentanan}}{\text{Kapasitas}}$

26. Pelaksana BPBD

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Menurunnya Resiko Bencana	Persentase Desa dan Kel tanggap bencana	%	$\frac{\text{Jumlah desa dan kel tanggap bencana}}{\text{Jumlah desa dan kel rawan bencana}} \times 100$

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
	Persentase kejadian bencana yang dapat ditangani	%	$\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang ditangani}}{\text{Jumlah Kejadian Bencana}} \times 100$

27. KANTOR KESBANGPOL

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	FORMULASI/ RUMUS PERHITUNGAN
Meningkatnya partisipasi politik masyarakat.	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilukada	%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih}}{\text{Jumlah Pemegang Hak Pilih}} \times 100$
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu Legislatif	%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih}}{\text{Jumlah Pemegang Hak Pilih}} \times 100$
	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Pilpres	%	$\frac{\text{Jumlah Pemilih yang menggunakan Hak Pilih}}{\text{Jumlah Pemegang Hak Pilih}} \times 100$

Pt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,

DYAH HAYUNING PRATIWI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 060/299 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEPUTUSAN BUPATI
 PURBALINGGA NOMOR 060/ 331 TAHUN
 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN
 PURBALINGGA

TARGET KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

Misi 1 : Menyelenggarakan pemerintahan yang profesional, efisien, efektif, bersih dan demokratis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	79	80	81	82
	Opini Audit Keuangan BPK	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP
	Kategori Akuntabilitas Kinerja	Kategori	60	63	65	67
	Hasil Penilaian LPPD	Nilai	3.28	3.33	3.33	3.5

Handwritten signature and date: 2018

Misi 2 : Mendorong kehidupan masyarakat yang religius yang beriman dan bertakwa ke hadirat Allah SWT serta mengembangkan paham kebangsaan guna mewujudkan rasa aman dan tentram dalam masyarakat yang berdasar pada realitas kehidupan

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Paham Kebangsaan	Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum	persen	81	85	87	-
Meningkatnya ketaatan terhadap Perda dan Perbup	Cakupan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	persen	96	98	98	99
Terwujudnya rasa aman dan tentram dalam masyarakat .	Angka Kriminalitas	persen	0,03	0,03		
Tertanganinya Korban Bencana	Cakupan Korban Bencana alam yang tertangani	persen	45	50	55	60

Misi 3 : Mengupayakan kecukupan kebutuhan pokok manusia utamanya Pangan dan Papan secara layak

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	Angka / nilai	85,82	86.22	86.76	87.64
Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni	Persentase rumah layak huni	persen	91,3	92,1	93	93,9
Ketersediaan rumah	Persentase rumah per KK	Persen	84,6	86,1	87,6	89,1

Misi 4 : Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia utamanya melalui peningkatan derajat pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Rata – rata lama sekolah	Tahun	7.33	7.61	7.76	7.92
	Harapan lama sekolah	Tahun	12.3	12.5	12.7	12.9
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia harapan Hidup	Tahun	73.1	73.2	73.3	73.4
Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Keluarga sejahtera	persen	78	79	80	81
Terkendalnya laju pertumbuhan penduduk	Rata-rata angka kelahiran total/ TFR	Per 1000 wanita	2.25	2.15	2.05	2

Misi 5 : Mempercepat pertumbuhan dan pemerataan ekonomi rakyat, dengan mendorong simpul – simpul perekonomian utamanya industri pengolahan manufaktur, perdagangan, jasa, pariwisata, industri kreatif dengan tetap berorientasi pada kemitraan dan pengembangan potensi lokal serta didukung dengan penciptaan iklim kondusif untuk pengembangan usaha, investasi dan penciptaan lapangan kerja.

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat dan pemerataan	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	persen	<5	<5	<4	<4
	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)	persen	>5	>5	>5	>5

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
ekonomi, berkurangnya angka pengangguran, serta terkendalinya angka inflasi	Laju Inflasi	persen	<5	<5	<5	<5
	Angka Kemiskinan	persen	16 - 18	15 - 17	14 - 16	13 - 15

Misi 6 : Mewujudkan kawasan perkotaan dan perdesaan yang sehat dan menarik untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya melalui gerakan masyarakat, yang didukung dengan penyediaan insfrastruktur/ sarana prasarana kewilayahan yang memadai

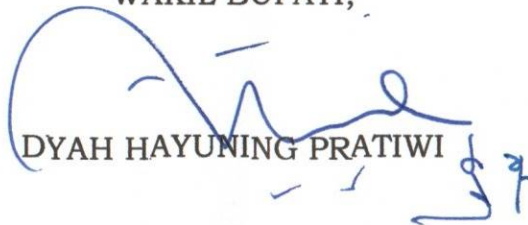
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Luasan Kawasan Kumuh	persen	0.6500	0.6600	0.6780	0.6800
Meningkatnya kualitas desa.	Indek Desa Membangun (IDM)	Angka	50	52	53	54
Ketersediaannya air permukaan untuk pertanian pada jaringan irigasi primer dan sekunder	Cakupan air irigasi	persen	43.8	45.2	46.7	48.2
Terwujudnya Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang,	Pemanfaatan Ruang sesuai peruntukan	persen	84	85	88	89
Meningkatnya aksesibilitas dan konektifitas wilayah	Panjang jalan kondisi mantap	persen	78.32	79.6	80.87	82.15

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
Meningkatnya akses air bersih	Cakupan pelayanan air bersih	persen	94.25	100	100	100

Misi 7 : Mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA			
			2018	2019	2020	2021
Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	60	61.5	62.5	63.5

Plt. BUPATI PURBALINGGA
WAKIL BUPATI,


DYAH HAYUNING PRATIWI